

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak atau adopsi memiliki definisi yang bermacam-macam antara lain, definisi pengangkatan anak atau adopsi menurut Ensiklopedia Bebas merupakan tindakan mengadopsi; diadopsi. Mengangkat anak atau adopsi adalah untuk mengambil ke dalam keluarga seseorang (anak dari orang tua lain), terutama akibat perbuatan hukum formal. Hal ini juga dapat berarti tindakan hukum mengasumsikan orangtua seorang anak yang bukan milik sendiri.<sup>6</sup> Definisi mengenai pengangkatan anak juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>7</sup> Selain itu juga dalam Peraturan Pemerintah juga menjelaskan mengenai pengangkatan anak dalam pasal 1 angka 1 yang isinya Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.<sup>8</sup>

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia beraneka ragam. Ter Haar berpendapat bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak

---

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Adopsi> akses 10 Mei 2018

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/adopsi> akses 10 Mei 2018

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan social baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan social kemasyarakatan.<sup>9</sup> Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum adat dikenal istilah terang dan tunai dan menurut Surojo Wignjosipuro terang dalam kaitannya dengan hukum adat berarti pengangkatan anak atau adopsi wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat, sedangkan tunai dalam kaitannya dengan hukum adat berarti perbuatan pengangkatan anak itu akan selesai seketika itu juga pada saat terjadinya acara pengangkatan anak secara terang.

Sedangkan dalam hukum islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 197 Nomor 129, yaitu masuknya anak dalam hubungan kekeluargaan orangtua angkat dan putusnya hubungan hukum anak dengan orangtua kandungnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung didasarkan pada firman Allah SWT surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5.<sup>10</sup> Maka dari itu hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat menurut hukum islam adalah hubungan antara orangtua asuh dengan anak asuh.

Untuk mengatasi masalah keberagaman hukum yang berlaku tersebut dalam ruang lingkup hukum perdata di Indonesia termasuk masalah pengangkatan anak atau adopsi anak, dikeluarkannya beberapa peraturan

---

<sup>9</sup> Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan., 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 32

<sup>10</sup> *Ibid*. Hal 112

yang mengatur mengenai masalah pengangkatan anak atau adopsi anak seperti :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak tanggal 7 April 1979. Dalam SEMA tersebut tidak terdapat mengenai definisi pengangkatan anak secara rinci hanya saja mengatur mengenai prosedur pengangkatan anak;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak tanggal 22 November 1983. SEMA ini merupakan lanjutan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang isinya berupa penyempurnaan dari prosedur pengangkatan anak di SEMA sebelumnya, sehingga tidak diatur pula mengenai pengertian pengangkatan anak;
3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak tanggal 14 Juni 1984. Bahwa dalam keputusan menteri sosial tidak terdapat pengertian pengangkatan anak dan hanya ada kumpulan petunjuk untuk melaksanakan perizinan pengangkatan anak yang mana syarat-syarat pengangkatan anak harus dipenuhi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tanggal 22 Oktober 2002. Dalam Undang-Undang ini juga

tidak terdapat pengertian pengangkatan anak, namun yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah tujuan pengangkatan anak dan pemenuhan hak-hak sebagai anak angkat;

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tanggal 17 Oktober 2014. Dalam Undang-Undang ini tidak terdapat pengertian pengangkatan anak, namun Undang-Undang ini membahas tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang mana perubahan tersebut terdiri atas pelengkap isi pasal dan menambahkan isi pasal yang mana terdiri dari tujuan pengangkatan anak, pihak-pihak pengangkatan anak, dan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2007. Dalam aturan ini pengangkatan anak didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat;
7. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak tanggal 8 Februari 2005 setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias. SEMA ini hanya mengatur tentang pengangkatan anak saat setelah terjadinya

bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, dan tidak mengatur tentang definisi pengangkatan anak;

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam Pasal 49 huruf a, angka 20 mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, namun untuk definisi pengangkatan anak tidak dijelaskan dalam aturan ini;
9. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan kompilasi hukum islam, dalam penetapan tersebut tidak terdapat pengertian pengangkatan anak, tapi hanya mengatur tentang anak angkat dan hak-hak anak angkat;
10. Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **B. Persyaratan Pengangkatan Anak**

Dalam hal melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak akan membahas mengenai *adoptan*, *adoptandus*, perbuatan hukum dan status anak angkat menjadi anak kandung yang didasari pada Staatsblad 1917 Nomor 129, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak beserta

peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

yang terbagi menjadi :

1. Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh orangtua angkat Warga Negara Indonesia (WNI);
3. Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh orangtua Warga Negara Asing (WNA).

Dalam penulisan ini hanya membahas tentang persyaratan pengangkatan anak termasuk persyaratan mengenai *adoptan* dan *adoptandus* sehubungan dengan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI).

Persyaratan mengenai *adoptan* atau orang yang boleh mengangkat anak didalam Staatsblad 1917 Nomor 129 diatur didalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristeri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anak nya.
2. Bahwa anak demikian tersebut harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri.
3. Perempuan janda yang tidak kawin lagi, yang oleh suaminya telah meninggal tersebut tidak meninggalkan seorang keturunan, menurut Pasal 5 ayat 3, dapat mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.

Penulis menyimpulkan bahwa pasal 5 tersebut mengatur mengenai persyaratan pengangkatan anak dengan kategori suami dan istri masih dalam ruang lingkup perkawinan yang sah, suami dan istri telah bercerai dan dalam

keadaan apabila seorang istri yang ditinggal suaminya karena meninggal (janda).

Persyaratan mengenai *adoptan* juga diatur didalam SEMA nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dan persyaratan mengenai *adoptan* menurut SEMA yaitu:

1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat diperbolehkan.
2. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Bahwa dalam SEMA tersebut menjelaskan pengangkatan anak dapat langsung dilakukan antara orangtua kandung dan orangtua angkat, setelah itu dalam hal pengangkatan anak orangtua angkat harus sama agama orangtua angkat dengan anak angkat.

Pelaksanaan pengangkatan anak selanjutnya diatur di dalam keputusan Menteri Sosialis Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, dimana didalam lampirannya diatur mengenai syarat-syarat *adoptan* sebagai berikut:

1. Berstatus kawin dan berumur 25 tahun atau maksimal 45 tahun;
2. Selisih umur antara calon orangtua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun;
3. Pada saat mengajukan permohonan Pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:
  1. Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli), atau
  2. Belum mempunyai anak, atau
  3. Mempunyai anak kandung seorang, atau

4. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
4. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat;
5. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
6. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
7. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Penulis mengambil kesimpulan dalam keputusan Menteri Sosial diatas bahwa syarat untuk mengangkat anak harus berstatus kawin yang mana antara suami dengan istri usianya harus berjarak 20 tahun, dimana umur maksimal orang tua untuk mengangkat anak adalah berumur 45 tahun dan minimal berusia 25 tahun serta usia pernikahan sudah mencapai 5 tahun sudah dapat mengajukan permohonan yang mana diutamakan dalam keadaan tidak mempunyai anak, belum mempunyai anak, mempunyai anak kandung seorang, atau mempunyai anak angkat seorang. Selain itu juga harus mampu ekonomi dengan adanya surat keterangan dari lurah maupun pejabat yang berwenang, berperilaku baik dengan surat keterangan dari kepolisian, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dari dokter, dan mengangkat anak hanya semata mata untuk kepentingan kesejahteraan anak dengan cara mengajukan pernyataan tertulis.



Persyaratan mengenai *adoptan* diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam Pasal 13 disebutkan bahwa calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Dalam peraturan pemerintah penulis mengambil kesimpulan bahwa syarat-syarat sebagai orangtua angkat harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berumur minimal 30 tahun dan maksimal berumur 55 tahun, agama harus sama dengan anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan, manikah dan usia pernikahan minimal 5 tahun, tidak pasangan sejenis, tidak memiliki anak atau memiliki seorang anak, keadaan mampu ekonomi dan sosial, mendapatkan persetujuan anak dan izin dari orangtua maupun wali anak, membuat pernyataan tertulis, memiliki laporan sosial dari pekerja sosial setempat, sudah mengasuh calon anak

angkat minimal 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, dan mendapat izin dari menteri atau kepala instansi sosial.

*Adoptandus* atau orang yang boleh diangkat sebagai anak angkat diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Staatsblad Nomor 129 yaitu:

#### Pasal 6

Orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain.

#### Pasal 7

1. Orang yang diangkat harus paling sedikitnya 18 tahun lebih muda daripada suami dan paling sedikitnya 15 tahun lebih mudah daripada isteri atau janda yang mengangkatnya.
2. Apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam staatsblad nomor 129 berbeda dengan aturan yang sebelumnya, karena mengatur tentang pengangkatan anak dari golongan Tionghoa yang mana dalam pasal diatas menjelaskan bahwa orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri dan tidak beranak, dan tidak diangkat oleh orang lain, orang Tionghoa yang dapat diangkat harus memiliki jarak antara anak angkat dan suami minimal 18 tahun dan dengan isteri (Janda) 15 tahun, anak angkat Tionghoa yang diangkat oleh keluarga sedarah, baik yang sah, maupun keluarga luar kawin.

Persyaratan mengenai *adoptandus* juga diatur didalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, yaitu:

## 2.2 Syarat bagi calon anak yang diangkat:

- 2.2.1 Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
- 2.2.2 Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Penulis disini mengambil kesimpulan bahwa SEMA diatas mengatur bahwa seorang calon anak angkat harus berada dalam asuhan suatu yayasan sosial yang mana dilampirkan juga surat izin tertulis dari menteri sosial dan calon anak angkat juga harus mempunyai surat izin tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk.

Persyaratan mengenai *adoptandus* selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Sosialis Nomor:41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak sebagai berikut:

1. Berumur kurang dari 5 tahun;
2. Persetujuan dari orangtua/wali (apabila diketahui ada);
3. Berada dalam asuhan organisasi sosial.

Kesimpulan penulis terhadap keputusan menteri diatas adalah seorang calon anak angkat minimal berumur 5 tahun, mendapatkan persetujuan jika ada dari orangtua atau wali, dan calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

Selanjutnya setelah dikeluarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 mengubah persyaratan mengenai *adoptandus* sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007, yang boleh diangkat sebagai anak adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Belum berusia 18 tahun;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga dalam lembaga pengasuhan anak;
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Bahwa kesimpulan penulis syarat anak angkat adalah belum berusia 18 tahun, calon anak angkata adalah anak terlantar atau ditelantarkan, selain itu juga calon anak angkat berada dalam asuhan keluarga dalam lembaga pengasuhan anak, dan calon anak angkat memerlukan perlindungan secara khusus.

Pada usia anak angkat yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, diatur di dalam Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007, yaitu:

1. Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama;
2. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak;
3. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa usia calon anak angkat terbagi menjadi 3 yang mana anak yang belum berumur 6 tahun itu menjadi prioritas utama, setelah itu anak yang berumur 6 dan belum berumur 12 tahun itu

hanya bisa dilakukan jika dalam keadaan dan alasan yang mendesak, dan calon anak angkat berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun jika calon anak angkat memerlukan perlindungan khusus.

### C. Pengertian Pembatalan Pengangkatan Anak

Bahwa setiap seseorang melakukan pengangkatan anak pasti mempunyai alasan mengangkat anak dengan kedepannya seorang anak mendapat status sebagai anak angkat. Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pengangkatan anak ini secara garis besar nya dapat diklarifikasikan dalam tiga sudut pandangan:<sup>11</sup>

- a. Karena berangkat dari faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari pengangkatan anak itu sendiri;
- b. Berkenaan dengan faktor sosial, yaitu yang mengangkat sosial efeknya dari perbuatan adopsi atau pengangkatan anak itu sendiri
- c. Tinjauan terhadap masalah yang timbul karena berkenaan dengan faktor psikologis.

Selanjutnya dengan adanya pengangkatan anak tersebut permasalahan baru akan muncul yang salah satunya adalah persoalan pembatalan pengangkatan anak. Pembatalan anak pengangkatan anak itu sendiri didahului berupa pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon yang menginginkan

---

<sup>11</sup> Agnesia Ariesta Kusuma. 2012. *Skripsi : Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 46

pengakuan dari pengadilan atas pengangkatan anak yang kemudian oleh pengadilan atas berbagai pertimbangan, setelah memenuhi pertimbangan dan persyaratan maka Pengadilan Negeri atas permohonan dari pemohon tersebut, akan menyetujui pengangkatan anak dan kemudian akan memberikan penetapan pengangkatan anak, dan untuk selanjutnya disebut sebagai orangtua angkat dan anak angkat yang memiliki hak dan kewajiban masing masing.<sup>12</sup>

Dengan adanya suatu hubungan hukum yang ada tersebut maka yang akan seringkali terjadi adalah salah satu pihak merasa dirugikan, dan pihak yang merasa dirugikan tersebut akan berpikir bahwa pengangkat anak itu sendiri harus dibatalkan penetapannya yang ada di Pengadilan Negeri, yang selanjutnya pihak tersebut akan mengajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak.

Maka setelah penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatalan pengangkatan anak adalah merupakan suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menghapus penetapan pengangkatan anak yang mana dalam hal ini salah satu pihak merasa dirugikan dengan adanya penetapan dan kemudian meminta untuk dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

Dalam hal pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan penetapan

---

<sup>12</sup> Ibid. Hal. 46

yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan untuk selanjutnya diperiksa dan diputus apakah pengangkatan anak tersebut memang layak untuk dibatalkan atau tidak.

#### **D. Alasan Pembatalan Pengangkatan Anak**

Bahwa pada pengangkatan anak yang mana berupa perpindahan kekuasaan, berupa perbuatan mengambil atau membawa anak orang lain menjadi layaknya seperti anak sendiri yang mana menimbulkan sebuah hubungan baru yakni hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan antara orangtua angkat dengan anak angkat yang berupa pemenuhan hak dan kewajiban, seringkali terdapat pihak yang merasa belum terpenuhi haknya atau pun pihak yang belum dan tidak bisa memenuhi kewajibannya, seperti orang tua yang tidak mampu untuk memberikan perlindungan kepada anak angkatnya dan tidak menjalankan kewajiban yang semestinya yang seharusnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak atau juga pihak orangtua angkat merasa dirugikan karena anak angkatnya melakukan perbuatan yang tidak semestinya sebagai anak angkat, seperti melakukan kekerasan dan sebagainya itu akan berakibat adanya pembatalan pengangkatan anak.<sup>13</sup>

Pada pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan akan dinyatakan batal demi hukum dan pengangkatan anak yang tidak sesuai

---

<sup>13</sup> Ibid. Hal 48

dengan pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dapat dinyatakan batal oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan itu menurut Staatsblad atau untuk orang Tionghoa, sedangkan yang berlaku sekarang adalah hak dan kewajiban pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>14</sup>

#### **E. Pembatalan Pengangkatan Anak menurut Peraturan Perundang-undangan**

##### **1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)**

Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terdapat Pasal dalam Staatsblad 1917 nomor 129 mengatur tentang pembatalan pengangkatan anak dan pembatalan itu diatur dalam Pasal 15 Staatsblad 1917 Nomor 129. Dalam Pasal 15 ayat 1,2, dan 3 menyebutkan

- 1) pengangkatan anak tidak dapat dihapuskan oleh saling persetujuan kedua belah pihak;
- 2) pengangkatan anak terhadap anak-anak perempuan dan dengan cara lain daripada dengan akta notaris, adalah batal demi hukum;
- 3) pengangkatan anak dapat dinyatakan batal karena bertentangan dengan salah satu pasal 5,6,7,8,9, atau ayat (2) dan (3) dari pasal 10.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa pengangkatan anak tidak dapat dihapuskan dikarenakan kedua belah pihak saling menyetujui dalam sebuah perjanjian, selain itu cara pengangkatan anak perempuan dan dengan cara lain yang mana tidak dilakukan dengan akta notaris maka dapat batal demi hukum, dan pengangkatan anak dapat dinyatakan batal juga karena

---

<sup>14</sup> Ibid. Hal 48



bertentangan dengan salah satu pasal 5,6,7,8,9, atau ayat (2) dan (3) dari pasal 10.

Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan:

1. Pengangkatan anak laki-laki oleh laki-laki kawin atau pernah kawin dikarenakan tidak mempunyai keturunan laki-laki.
2. Pengangkatan anak dilakukan oleh suami bersama dengan isterinya. Apabila perkawinan putus maka pengangkatan anak dilakukan oleh suami.
3. Pengangkatan anak laki-laki oleh janda apabila tidak ada anak laki-laki dari perkawinan dengan suaminya.

Bahwa dalam pasal 5 penulis mengambil kesimpulan tentang pengangkatan anak jika seorang anak diangkat oleh laki-laki yang kawin atau pernah kawin karena tidak mempunyai anak laki-laki, selain itu dapat dilakukan oleh sepasang suami isteri atau dilakukan setelah bercerai oleh dia sendiri, dan seorang janda yang tidak kawin lagi, ditinggal suami meninggal, dan tidak ada keturunan boleh mengangkat anak, akan tetapi jika suami meninggal dan meninggalkan wasiat yang mana isinya tidak boleh mengangkat anak, maka tidak dibolehkan mengangkat anak.

Selain itu juga dalam Pasal 6 mengatur bahwa yang dapat diangkat menjadi anak angkat adalah orang Tionghoa laki-laki tidak kawin, tidak mempunyai anak, dan anak angkat belum diangkat oleh orang lain, dalam Pasal 7 menjelaskan batas minimum usia anak yang dapat diangkat yaitu 18 tahun lebih mudah dibandingkan dengan laki-laki yang mengangkatnya dan paling sedikit 15 tahun lebih mudah dibandingkan dengan wanita yang bersuami atau janda yang melakukan pengangkatan anak. Pada Pasal 8 berisikan tentang wajib mendapatkan persetujuan pengangkatan anak.

Pasal 10 ayat 2 dan 3 berisikan pihak-pihak yang menghadap dalam akta notaris baik para pihak itu sendiri atau oleh kuasanya.

## **2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap orangtua dan anak memiliki hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini diatur dalam BAB X tentang Hak dan Kewajiban Orangtua dan Anak diantaranya:

Dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang kewajiban orangtua kepada anaknya yang mana menyebutkan

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Bahwa penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud dari Pasal tersebut diatas adalah setiap orangtua memiliki kewajiban yang mana tidak boleh sampai menelantar kan anak nya dan harus merawat serta memberi pelajaran kepada anak nya dengan semaksimal mungkin dan itu berlaku sampai anak sudah menikah atau dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, walaupun orangtua nya sudah cerai tetap saja harus merawat dan memberikan pelajaran kepada anaknya.

Selanjutnya dalam Pasal 46 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang kewajiban anak kepada orangtua nya yang menyebutkan

- (1) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Penulis mengambil kesimpulan dari Pasal tersebut adalah tiap seorang anak memiliki kewajiban untuk menjaga sopan santun dalam hal bertingkah laku dan berbicara serta mematuhi setiap perkataan orangtua, dan setelah anak dewasa maka wajib untuk merawat dan menjaga orangtua sebisanya atau semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitasnya, dan tidak hanya orangtua itu sendiri tapi juga keluarga nya, namun dalam hal keluarga ini hanya jika memang dalam keadaan darurat saja

### **3. Menurut Undang-Undang dan Peraturan Lain**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2007, tidak dijelaskan tentang pembatalan pengangkatan anak dan begitu juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak tanggal 7 April 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak tanggal 22 November 1983, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak tanggal 14 Juni 1984, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tanggal 22 Oktober 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tanggal 17 Oktober 2014, SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak tanggal 8 Februari 2005 setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penetapan pengangkatan anak berdasarkan kompilasi hukum islam

#### **F. Tujuan Hukum**

Bahwa segala sesuatu memiliki sebuah tujuan yang mana dalam hal ini adalah tujuan hukum dan untuk mencapai itu maka dapat dilihat melalui tiga teori yaitu keadilan hukum yang mana dalam kamus besar bahasa indonesia, adil berarti “tidak berat sebelah, memperlakukan atau menimbang sesuatu dengan cara yang sama dan serupa serta tidak pincang atau berpihak kepada yang benar; berpegang kepada kebenaran.” Karena itu adil menyangkut persoalan moral atau budi pekerti<sup>15</sup>, kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara<sup>16</sup>, Dan kemanfaatan hukum merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan

<sup>15</sup> Dedesitirohmah. *Tujuan Keadilan Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum*. <https://dedesitirohmah92.wordpress.com/2015/03/26/tujuan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum/>. Diakses tanggal 06 Agustus 2018

<sup>16</sup> Staf. *Arti Kepastian Hukum Makna Pengertian Dan Definisi Dari Kepastian Hukum*. <https://www.apaarti.com/kepastian-hukum.html>. Diakses tanggal 06 Agustus 2018

manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>17</sup>

Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.<sup>18</sup> Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.<sup>19</sup> Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu: <sup>20</sup>

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal yang kongkret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum
3. Sangat individualistis dan tidak memberikan pada perasaan hukum seorang

---

<sup>17</sup> Muhammad Ridwansyah. 2016. *Mewujudkan Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*. Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

Maka dari itu segala sesuatu diciptakan tentunya memiliki tujuan tersendiri, begitu juga dengan hukum. Terdapat berbagai teori yang dikemukakan oleh ilmuwan hukum untuk memberikan penjelasan terkait dengan tujuan hukum namun tujuan hukum yang paling banyak dikemukakan adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan seperti yang tersebut diatas. Hal serupa juga dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwechmaerten*), dan kepastian (*rechtssicherheit*).<sup>21</sup> tujuan tersebut berhubungan erat untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil maupun dalam arti materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>22</sup> Dalam praktik penegakkan hukum ke tiga tujuan tersebut harus diperhatikan secara proporsional. Akan tetapi ketiga tujuan hukum tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain. Dalam konteks tertentu keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian, bahkan tuntutan kemanfaatan juga dapat bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum.

---

<sup>21</sup> Nur Rizkiya Muhlas. *Tujuan Hukum: Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan*. <http://nurrizkiyamhls.blogspot.com/2018/05/tujuan-hukum-keadilan-kepastian-dan.html>. Diakses tanggal 07 Agustus 2018

<sup>22</sup> Rasjuddin. *Hubungan 3 Tujuan Hukum: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan*. <http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>. Diakses tanggal 07 Agustus 2018

Sering kali dalam implementasi tujuan tersebut justru terkesan saling bertentangan. Dalam pemberlakuannya, para penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, cenderung hanya menyandingkan fakta-fakta hukum terhadap aturan-aturan yang berlaku demi mengedepankan kepastian hukum. Akibatnya, sering kali tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam arti yang sesungguhnya keadilan materil menjadi terabaikan.<sup>23</sup>

Dalam teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana yang diprioritaskan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum. Teori ini sejalan dengan teori filsafat hukum yang juga mengagungkan keadilan, mulai teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, selalu mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Banyak teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, semua menegaskan bahwa keadilan harus diagungkan. Keadilan harus di nomorsatukan, dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia. Itulah keadilan yang seharusnya selalu diperjuangkan. Maka demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat, asas prioritas dalam tujuan hukum yang dikeluarkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman dan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang.

---

<sup>23</sup> Muh. Ridha Hakim. 2016. *Implementasi Rechvinding yang Berkarakteristik Hukum Progresif*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No.2. Juli 2016. Hal. 228

## G. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam hal memberikan pertimbangan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau perkara terdapat sebuah pembuktian. Dalam perkara perdata, pembuktian bertujuan untuk memberi keyakinan kepada hakim tentang peristiwa atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak, dan pihak-pihak itu sendiri adalah penggugat yang mana pembuktian bertujuan untuk memberi keyakinan kepada hakim tentang gugatan yang dikemukakannya dipersidangan sehingga gugatan nya tersebut dapat dikabulkan oleh hakim.<sup>24</sup> Begitu juga sebaliknya seorang tergugat, pembuktian bertujuan untuk mencegah terjadinya peristiwa yang dikemukakan oleh tergugat, sehingga gugatan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.<sup>25</sup>

Dalam hal syarat peristiwa yang dapat diterima oleh hakim sebagai tolak ukur relevansi peristiwa yang diajukan dengan perkara yang disengketakan adalah:<sup>26</sup>

1. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang disengketakan sebab pembuktian merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa;

---

<sup>24</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2016. *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*. Bandung. Penerbit CV Nuansa Aulia. Hal. 162

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.



2. Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terikat dengan ruang waktu, peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan;
3. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan, dan peristiwa itu tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.

Selain itu juga dalam melakukan pembuktian, harus diperhatikan asas-asas terkait hukum pembuktian tersebut dan berikut beberapa asas hukum pembuktian dalam hukum acara perdata:<sup>27</sup>

1. Asas *Audi Et Alteram Partem*; adalah asas kesamaan proses dan para pihak yang berperkara. Berdasarkan asas ini, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan untuk mendengarkan kedua pihak. Hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama.
2. Asas *Ius Curia Novit*; bahwa Hakim selalu difiksikan mengetahui akan hukumnya dari setiap kasus yang diadilinya. Hakim sama sekali tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara hingga putus dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.
3. Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*; bahwa tidak seorangpun yang dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri. Sehingga berdasarkan asas ini, baik pihak penggugat atau pun

---

<sup>27</sup> Asas Pembuktian Perdata. <http://www.gresnews.com/berita/tips/81796-asas-pembuktian-perdata>. Diakses tanggal 07 Agustus 2018.

pihak tergugat tidak mungkin tampil sebagai saksi dalam persengketaan antara mereka sendiri.

4. Asas *Ne Ultra Petita*; bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Sehingga dalam pembuktian hakim tidak boleh membuktikan lebih daripada apa yang dituntut oleh penggugat.
5. Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*; asas ini menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan lebih banyak hak dari pada apa yang dimilikinya.
6. Asas *Negativa Non Sunt Probanda*; bahwa sesuatu yang bersifat negatif itu tidak dapat dibuktikan. Yang dimaksud sebagai sesuatu yang bersifat negatif adalah yang menggunakan perkataan "TIDAK", misalnya : tidak berada di Jakarta, tidak merusak tanaman, tidak berutang kepada si A, dan lain-lain. Namun yang negatif ini dapat dibuktikan secara tidak langsung.
7. Asas *Actori Incumbit Probatio*; bahwa asas ini terkait dengan beban pembuktian. Asas ini berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai suatu hak atau menyangkali adanya hak orang lain, harus membuktikannya. Hal ini berarti bahwa dalam hal pembuktian yang diajukan penggugat dan tergugat sama-sama kuat, maka baik penggugat maupun tergugat ada kemungkinan dibebani dengan pembuktian oleh hakim.

8. Asas Yang Paling Sedikit Dirugikan; bahwa hakim harus membebani pembuktian bagi pihak yang paling sedikit dirugikan jika harus membuktikan. Asas ini sering dihubungkan dengan asas Negativa non sunt probanda. Jadi yang dianggap pihak yang paling dirugikan jika harus membuktikan adalah pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif.
9. Asas *Bezitter* Yang Beriktikad Baik; bahwa iktikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai sesuatu benda dan barang siapa menggugat akan adanya iktikad buruk *bezittter* itu harus membuktikannya (lihat pasal 533 BW).
10. Asas Yang Tidak Biasa Harus Membuktikan; bahwa barangsiapa yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan sesuatu yang tidak biasa itu.

Selanjutnya untuk menilai suatu perkara, maka dapat diajukan alat-alat bukti yang mana menurut sistem HIR/Rbg, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan dalam undang-undang, ini membuktikan bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan lima alat bukti yang sah, dan alat-alay bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata adalah:<sup>28</sup>

- a. Pasal 164 HIR/284 Rbg yaitu:
  1. Alat bukti surat;
  2. Alat bukti saksi;
  3. Alat bukti persangkaan;

---

<sup>28</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar. Op.cit. hal.171

4. Alat bukti pengakuan; dan
  5. Alat bukti sumpah.
- b. Alat bukti lain yang penting sebagai alat bukti:
1. Alat bukti pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR/180Rbg)
  2. Alat bukti saksi ahli (Pasal 154 HIR/181 Rbg)
  3. Alat bukti pembukaan (Pasal 167 HIR/296 Rbg)
  4. Pengetahuan Hakim (Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) Rbg)
- c. Alat bukti diluar undang-undang sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti *compact disc*, *photographic*, potret, televisi, radar, radio, *genetic engineering*, percakapan melalui seluler.

#### **H. Putusan Hakim**

Semua yang mengandung unsur sengketa dan diajukan ke pengadilan akan diakhiri dengan dibacakannya putusan oleh hakim dan tujuan dari pada putusan tersebut adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut dapat dilaksanakan. Akan tetapi dari ketentuan-ketentuan Pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, Pasal 30 RO, serta Pasal 13, 14, dan 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka tidak ditemukan mengenai pengertian terhadap putusan hakim, namun pengertian putusan hakim tersebut dapat ditemukan dari beberapa pendapat ahli hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Sunarto. 2014. *Peran aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 191

Menurut I Rubini dan Chidir Ali merumuskan putusan sebagai bentuk suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut juga sebagai vonnis yang merupakan kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya, selain itu juga menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan dipersidangan, dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.<sup>30</sup>

Bahwa dari pengertian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebuah putusan harus memenuhi persyaratan diantaranya:

1. Putusan harus diucapkan oleh hakim yang berwenang;
2. Putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum; dan
3. Bertujuan untuk mengakhiri suatu permasalahan dalam perkara antara para pihak.

Dalam prosesnya hakim harus menyesuaikan antara fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara objektif, kemudian menerapkan peraturan atau hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menurut Sunaryati Hartono, putusan hakim mempunyai beberapa fungsi:<sup>31</sup>

1. Putusan hakim sebagai perwujudan upaya untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Disini putusan hakim ditekankan pada fungsi mekanisme pengintegrasian dalam mencegah konflik dan

---

<sup>30</sup> Ibid. Hal.192

<sup>31</sup> Ibid.

menyelesaikan atau mengatasinya dengan cara damai dan tertib apabila konflik telah terjadi;

2. Putusan sebagai perwujudan upaya penemuan hukum. Dalam hal tersebut putusan hakim ditekankan pada hubungan fungsi dan tugas hakim dengan undang-undang yang ada. Arti penting pandangan ini terletak pada hubungan pelaksanaan tugas hakim dengan undang-undang yang tidak selalu lengkap selengkap-lengkapnyanya dan tidak selalu sejelas-jelasnya, karena tertinggal oleh perkembangan masyarakat yang lebih cepat;
3. Putusan hakim sebagai perwujudan *law as a tool of social engineering*. Disini putusan hakim ditekankan pada fungsi pengstrukturasi kembali suatu masyarakat yang didasarkan pada tatanan dan nilai-nilai tertentu untuk ditujukan kepada masyarakat baru.

Perlu diingat juga, bahwa isi putusan adalah:<sup>32</sup>

1. Kepala putusan, ini memuat titel eksekutorial. Titel eksekutorial ini memberikan kekuatan pelaksanaan pada putusan;
2. Identitas para pihak, identitas para pihak ini minimal harus memuat nama, alamat, pekerjaan, umur. Kalau memakai pengacara maka dimuat pula nama pengacara tersebut;
3. Pertimbangan/*Considerant*

---

<sup>32</sup> Wahyu Muljono. 2012. *Teori dan Praktek Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Yustisia. Hal. 139

Konsideran ini merupakan dasar putusan. Dalam praktik perkara perdata, pertimbangannya dibagi menjadi 2, masing-masing adalah pertimbangan mengenai duduknya perkara/peristiwanya, kemudian juga pertimbangan mengenai hukumnya;

#### 4. *Amar/Dictum*

Amar atau *dictum* ini merupakan jawaban hakim terhadap petitum yang diajukan oleh penggugat/tergugat. Hingga dengan demikian semua yang diajukan oleh para pihak dipertimbangkan. Amar juga dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *deklaratif* merupakan penetapan dari hubungan hukum yang menjadi sengketa, dan *dispositif* yang memberi hukuman, apakah gugatan diterima/ditolak.